

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan sikap dan kebijakan China di Myanmar berkaitan dengan perdamaian etnis yang kini tengah dilakukan. China menjadi aktor inti yang dibahas dalam penelitian ini, dimana ia memanfaatkan kekuatannya sebagai jalan untuk melancarkan sikap dan kebijakannya di negara lain. Sikap dan kebijakan China tersebut selanjutnya dianalisa dengan dua perspektif yakni *economy-security nexus* dan teori stabilitas hegemonik, yang akan lebih menjelaskan posisi dan peran China dalam hubungannya di Myanmar serta hasil yang didapatkan pasca semua strategi terlaksana.

Myanmar merupakan salah satu negara yang hingga kini belum dapat terbebas dari belenggu konflik etnis. Keadaan politik dan ekonomi kacau balau karena tiap-tiap etnis mengadakan bentrokan baik dengan pemerintah Myanmar, maupun antar etnis dalam tujuan merebut wilayah kekuasaan. Konflik antar etnis ini telah menyebabkan jatuhnya banyak korban, bahkan beberapa diantara konflik tersebut menjadi alasan utama pengungsi membanjir ke negara-negara sekitar Myanmar pada tahun 2017. Tentu hal ini menarik perhatian dunia untuk turut ikut campur dalam penyelesaian konflik tersebut, tidak terkecuali China sebagai negara terdekat yang berbatasan langsung dengan Myanmar. Keamanan dan stabilitas Myanmar menjadi hal penting bagi China karena selaras dengan kebijakan “*China’s peaceful rise*” yang salah satu poinnya adalah membantu menciptakan

keamanan dan stabilitas global bersamaan dengan pertumbuhan negaranya. China dalam kebijakan dan sikapnya di Myanmar menerapkan dua arah pendekatan pada dua aktor yang berbeda, yakni pada etnis yang bersangkutan UWSA dan pada pemerintah Myanmar Naypyidaw.

Perspektif analisa pertama yakni konsep economy-security nexus diterapkan oleh China untuk mendekati aktor etnis-etnis partisipan, dengan fokus utama adalah United Wa State Army (UWSA) yang dinilai menjadi ketua dari etnis-etnis minoritas di Myanmar. Berawal dari kedekatan China dengan Communist Party of Burma (CPB), jalur internalisasi kebijakan di Myanmar sudah terbuka lebar. Pasca CPB hancur, China dikenal memiliki kedekatan khusus dengan etnis-etnis bekas pecahan CPB baik berdasarkan aspek historis atau kesamaan ideologi komunis yang dianut kedua belah pihak. UWSA merupakan salah satu etnis pecahan CPB yang mendapatkan perhatian lebih dari China, bahkan hingga dunia internasional mengklaimnya sebagai anak haram China.

Banyak bantuan ekonomi China yang mengalir ke UWSA baik dalam bentuk resmi maupun tak resmi. Bantuan ekonomi resmi tersebut berasal dari hubungan perdagangan pemerintah China dan UWSA, dimana impor dan ekspor keduanya cukup masif dibidang bahan-bahan baku baik alam maupun mineral. Sementara hubungan tidak resmi terjalin antara masyarakat China dan UWSA, dalam berbagai bentuk seperti jual beli senjata, pendanaan langsung oleh perusahaan China bahkan jual beli barang ilegal seperti opium. Opium merupakan

sumber dana UWSA terbesar karena wilayahnya yang berada di kawasan Golden Triangle, kawasan pemasok opium terbesar nomor 2 di dunia.

Derasnya dana resmi dan tidak resmi tersebut menjadikan China dan UWSA sebagai mitra yang dekat di segala aspek. Hal ini pun menjadi celah bagi China untuk turut mengambil peran dalam perdamaian yang kini diusung Myanmar dalam bentuk Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) dan konferensi Panglong ke 21. Hubungan dekat antara China dan UWSA yang diawali dari aspek ekonomi tersebut membuat UWSA bergantung dengan China. Ditunjukkan dengan permintaan khusus UWSA pada pemerintah Myanmar untuk mengikutsertakan China sebagai pihak ketiga di dalam negosiasi damai, atau permintaan China untuk melakukan negosiasi dengan pemerintahan Myanmar untuk kehadiran UWSA di konferensi Panglong ke 21.

Kehadiran China di dalam alur negosiasi damai Myanmar tersebut diterima baik oleh pemerintah Naypyidaw. Walaupun terkesan memiliki unsur intervensi karena China turun langsung ke konflik ini tanpa memikirkan posisinya yang non-partisipan, China memiliki ruang gerak yang cukup luas karena implementasi perspektif pendekatannya yang kedua yakni hegemoni. Dengan perspektif analisa teori stabilitas hegemonik ini, China menciptakan ketergantungan dan kedekatan hubungan dengan pemerintah Myanmar untuk melancarkan kebijakannya. Diawali dari hal yang sama, China memanfaatkan kekuatan ekonominya sehingga Myanmar menjadikan China partner atau mitra utama didalam setiap aspeknya. Usaha China ini dipermudah dengan kondisi Myanmar sebagai negara dunia ketiga dan tengah mengalami konflik. Dengan keadaan seperti itu tentu bantuan China sebagai negara

dengan tingkat ekonomi tertinggi didunia menjadi sangat dibutuhkan oleh Myanmar. Ketergantungan Myanmar akan ekonomi China ini dapat dilihat dari hubungan ekspor impor, keamanan, investasi asing bahkan pinjaman hutang negara, dimana China menduduki nomor satu diantara negara-negara lainnya.

Kebergantungan Myanmar tersebut, membuat Myanmar tidak memiliki pilihan lain untuk menolak peran China dalam negosiasi damai. Sebaliknya, Myanmar memandang China sebagai titik terang penyelesaian konflik etnis selama ini karena China lah yang memiliki kedekatan dan kesempatan untuk berdialog dengan etnis-etnis tersebut secara langsung. Adanya rasa ketidakpercayaan etnis terhadap pemerintah Myanmar juga menjadi faktor pendukung China sebagai pihak solutif diantara kedua belah pihak. Pengiriman utusan khusus ke Myanmar, pendirian kantor khusus pengawas perdamaian, bahkan hingga pendanaan fasilitas untuk negosiasi damai telah dilakukan China dan menerima respon yang positif dari pemerintah Myanmar sendiri.

Walau memiliki pendekatan yang berbeda bagi tiap aktor, China memastikan posisinya di dalam konflik ini sebagai pihak yang netral. Walau banyak bantuan yang mengalir kepada etnis pemberontak, China memiliki satu tujuan agar dapat berdialog atau bahkan membujuk secara tidak langsung terhadap para etnis tersebut agar tercipta situasi kondusif dalam negosiasi damai dengan pemerintah Myanmar. China pun melakukan hal yang sama bagi pemerintah Myanmar, membujuknya agar berlaku adil bagi semua etnis, agar semua aspirasi etnis tersebut dapat terdengar dan terwujud perdamaian yang tidak merugikan siapapun.

Usaha China tersebut, hingga pada akhir tahun 2017 telah menunjukkan tahapan yang positif. Sebanyak 8 dari 15 etnis yang diundang ke NCA telah menandatangani dan setuju akan perjanjian damai tersebut. Selanjutnya dalam konferensi Panglong, hampir semua etnis yang berada di Myanmar termasuk etnis yang tidak menyetujui NCA telah diundang dan hadir, bahkan FPNCCC yang dipimpin oleh UWSA sebagai kelompok etnis yang menolak NCA telah melakukan negosiasi ulang tentang alternatif baru. Kelompok lainnya UNFC sedang melakukan negosiasi ulang untuk membicarakan kembali persyaratan dalam penandatanganan NCA. Hingga akhir 2017, konferensi Panglong yang dinilai akan menjadi awal baru bagi stabilitas Myanmar belum mencapai akhir. Konferensi tahap ketiga akan diselenggarakan pada akhir bulan Januari sesuai dengan kesepakatan.

Pencapaian-pencapaian Myanmar dalam langkahannya menuju perdamaian tersebut cenderung membaik jika dibandingkan dengan Perjanjian Panglong pertama yang tidak melibatkan semua etnis dalam perumusan draftnya. Namun penulis merasa karya tulis ini belum sempurna karena adanya pembatasan waktu yang hanya sampai akhir tahun 2017, sehingga hasil mutlak untuk menganalisa keberhasilan China dalam mewujudkan stabilitas kawasan belum dapat terlihat dengan jelas. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran guna membuat karya tulis ini menjadi lebih baik.